

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 1995, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Ctk. Pertama, Alumni Bandung
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta
- A.P Parlindungan, 1999, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung
- Bachsan Mustafa, 2000, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Bandung
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta
- Effendi Perangin, 1995, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Ctk. Keempat, Rajawali, Jakarta.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Imam Sutiknjo, 2002, *Proses Terjadinya UUPA*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jamaluddin Mahasari, 2008, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta.
- Mukmin Zakie, 2013, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera.
- Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar Dan Implementasi*, Ctk. Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, Rajawali, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyud Maergono, 2000, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Universitas Gajah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, 2002, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan Eksekutif*, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Komprehensif*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan:

- Berita Acara Gelar Perkara Tanah Inclave HGU PT. Sarana Mandiri Mukti
- Daftar sengketa, konflik, perkara pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2012
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Agraria, *Tata Laksana Penguasaan Hak Atas Tanah*, Proyek P3HT
- Laporan BPN RI Tahun 2007
- Pasal 4 ayat (1) PP No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan

Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang

Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan

Menganai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 49 Tahun 1998

Tentang Penetapan Incalve Desa dalam Wilayah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Tingkat II

Rejang Lebong

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Data Elektronik:

Dokumen.tips/documents/tugas-sengketa-tanah.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2016

Ebookdig.biz/ebook/q/pdf/penyelesaian-sengketa-tanah.html diakses pada tanggal 1 November 2016

<https://omtanah.com/2010/11/17/penyelesaian-sengketa-pertanahan/> diakses pada 31

Oktober 2016

<http://retnoanggraeni.student.esaunggul.ac/idpengertian-hak/> diakses pada tanggal
15 Januari

2017

www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2016